

RENCANA KERJA KECAMATAN BUAHBATU



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Buahbatu setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan serta penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu tidak terlepas dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 903/2769 – Bappelitbang dan 900/1432 – DPRD tanggal 1 Agustus 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Buahbatu yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top - Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Buahbatu tahun 2020 merupakan rencana tahunan, dimana dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu tahun 2018 – 2023 telah masuk tahun kedua. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD maka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.



Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2020.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buahbatu khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, Juli 2019

Camat Buahbatu



Drs. DENNY SANY, M.Si

NIP. 19650810 198603 1 024

GEMAH RIPAH WISAWA MUKTI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUAHBATU TAHUN 2019	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buahbatu Tahun 2019 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Buahbatu	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buahbatu.....	46
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RPKD	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	70
3.1.1. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024	70
3.1.2. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	73



	Provinsi Jawa Barat	
	3.1.3. Penelaahan terhadap Rancangan KLHS	77
	3.1.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu	81
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	86
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	89
	
BAB V	PENUTUP	102
	





DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) s/d Tahun 2019	21
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	45
2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	56
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Bandung	66
3.5	Isu-isu Strategis	82
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Bandung	93

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI



DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 2



BAB I

PENDAHULUAN

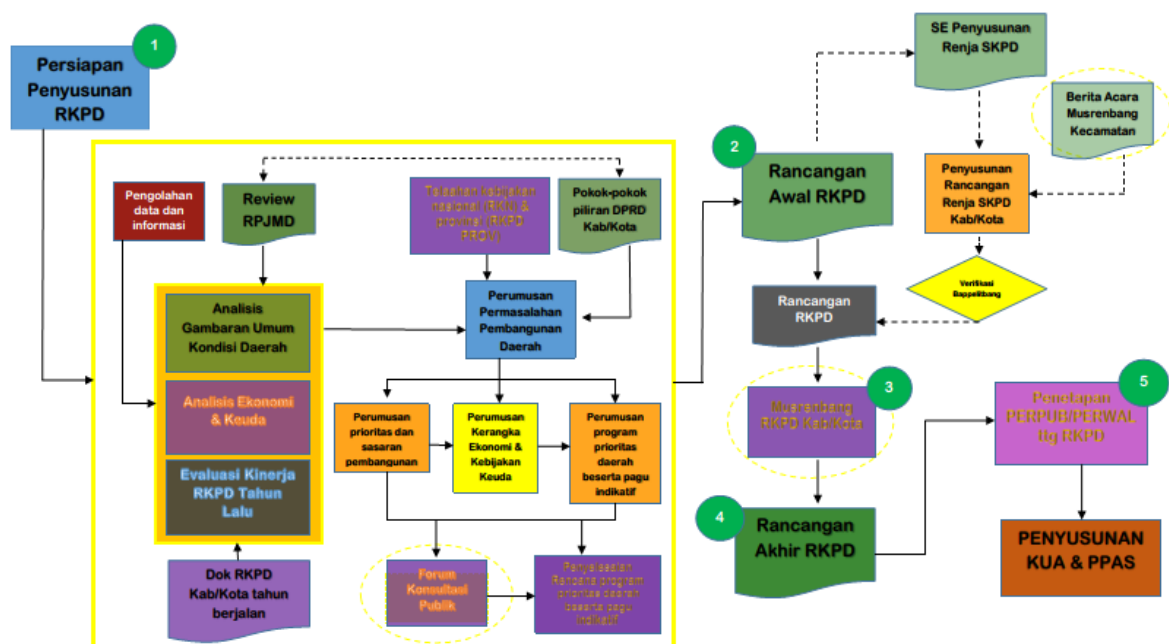
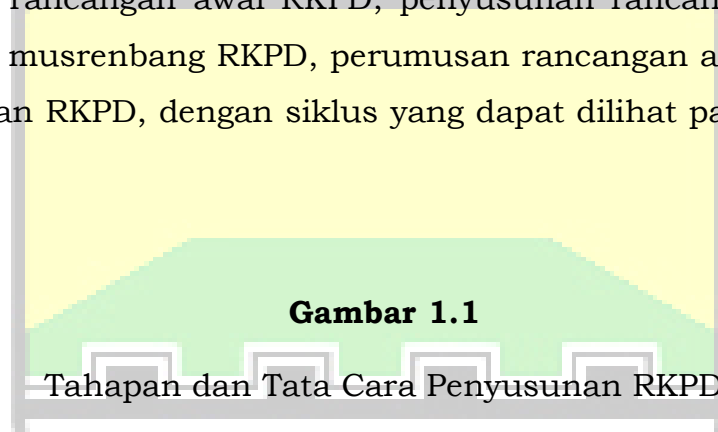
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. RKPD Kecamatan Buahbatu disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :

- 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
- 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
- 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok

pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:
 - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Menyetakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. Menyetakati prioritas pembangunan daerah;
 - c. Menyetakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
 - d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan

kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan



desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2021 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2020 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2021 menjadi lebih transparan dalam



proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.





1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Buahbatu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);



21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: (8/294/2016));
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkup Pemerintah Kota Bandung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2021 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2021.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Buahbatu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUAHBATU TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buahbatu Tahun 2019 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Buahbatu

Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Buahbatu Kota Bandung Nomor : 031/Kec.Bubat Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator adalah sebagai berikut :



Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Buahbatu
	2. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Bersamaan dengan Reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2019 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	78,23
		Persentase Temuan BPK Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	47,03
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	44,80

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019

Capaian kinerja keuangan tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Langsung tahun 2019 adalah sebesar Rp. 27.190.796.721,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 11.435.571.215 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.755.225.506,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2019

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	6.282.939.862	6.169.377.858	98,19
2	Sasaran 2	1.399.488.050	1.383.282.450	98,84
3	Sasaran 3	6.661.153.594	6.489.563.027	97,42
	Jumlah	14.343.581.506	14.042.223.335	97,89



**PROGRAM, PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA OUTPUT
KECAMATAN BUAHBATU TAHUN 2019**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
1	Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		2.767.941.400	2.742.988.259		99,10
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	81.973.400	73.947.250	IKM layanan kependudukan	90,21
		Pembinaan RT RW	2.685.968.000	2.669.041.009	Cakupan RT RW terbina	99,37
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		2.164.792.499	2.093.525.350		96,71
		Pemeliharaan drainase dan kebersihan lingkungan	1.767.990.192	1.722.522.050	- Panjang ruas jalan yang terpelihara - Panjang drainase terpelihara	97,43
		Pemeliharaan RTH Kecamatan	354.313.271	329.195.050	Jumlah taman terpelihara	92,91
		Pengecatan kerb bahu jalan	42.489.036	41.808.250	Panjang kerb bahu jalan terpelihara	98,40
3	Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		2.410.514.030	2.316.829.090		96,11
		Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	45.646.000	41.074.690	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah koperasi juara	89,99
		Pengendalian keamanan lingkungan	1.387.467.230	1.321.516.200	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	95,25
		Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan	387.257.000	374.484.880	- Jumlah RW berdaya - Jumlah posyandu	96,70



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
					purnama	
		Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial	590.143.800	579.753.320	- Jumlah RW siaga - Jumlah kagana Kelurahan	98,24
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD kewilayahan	-	-	1 musrenbang	-
4	Pemberdayaan Kewilayahan		10.286.119.708	9.451.046.253		91,88
		Pemberdayaan Lingkup RW	8.500.230.683	7.944.528.769	Persentase RW unggul	93,46
		Pemberdayaan Lingkup PKK	599.699.836	525.389.250	Persentase PKK unggul	87,61
		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	597.788.566	498.250.554	Persentase Karang Taruna unggul	83,35
		Pemberdayaan Lingkup LPM	588.400.623	482.877.680	Persentase LPM unggul	82,07
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.649.209.912	1.374.749.547		83,36
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.369.879	133.398.690	Jumlah laporan komunikasi, air dan listrik	71,96
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.263.370	8.928.800	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan perijinannya	34,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	63.491.270	48.370.900	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	76,19
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.661.130	31.339.000	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terealisasi	74,33
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.161.244	77.950.250	Jumlah laporan penyediaan ATK	72,07
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.079.180	93.612.130	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan pengadaan yang terealisasi	69,30
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.431.314	11.599.700	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/	62,93



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
					penerangan bangunan kantor yang terealisasi	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.736.025	133.398.690	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	92,12
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.275.000	24.642.100	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	90,35
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.236.000	24.742.000	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	76,75
		Penyediaan Makanan dan Minuman	189.771.500	154.710.955	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	81,52
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	58.734.000	16.585.172	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28,24
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	636.000.000	633.500.000	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	99,61
		Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	-	-	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	-
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		955.147.375	650.663.130		68,12
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.334.297	43.945.000	Jumlah jenis penyediaan perlengkapan gedung kantor	99,12
		Pengadaan Mebeulair	63.207.538	61.346.560	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	97,06
		Pemeliharaan Rutin/Berkala	129.438.260	62.172.100	Jumlah unit	48,03



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
		Gedung Kantor			bangunan terpelihara	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	619.035.280	483.199.470	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	78,06
		Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	99.132.000	-	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-
7	Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-		-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya terealisasi	-
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu yang terealisasi	-
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60.000.000	59.620.000		99,37
		Pembinaan Kinerja Aparatur	60.000.000	59.620.000	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	99,37
Jumlah Total			20.293.724.924	18.689.421.629		92,09

Sumber : Data SIMDA per 31 Desember 2019 sebelum rekonsiliasi

1. Peningkatan Peran kecamatan dan Kelurahan dengan anggaran 5.954.479.622; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah:

- Kegiatan Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan & kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 82.039.930, Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen UMKM, Dokumen Koperasi, Dokumen Produksi Unggulan, Dokumentasi Kewirausahaan dan UMKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.



- 721.697.260,- Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Kemasyaratakan meliputi kegiatan Dokcil, MTQ, PAUD, Pendataan PMKS, RBM, Tarling, Penanaman TOGA, UKS, Warmis dan WPA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- c. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.898.209.832. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Musrenbang, Dokumen Bank Sampah, Dokumen Biopori, Dokumen Daur Ulang, Dokumen Urban Farming, Dokumen Eco Office, Dokumen Zero Waste, Dokumen Bebersih Sungai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- d. Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 890.625.000. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen PKL, Dokumen Anggota Linmas, dan Dokumen Satwankar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- e. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan pemerintahan Umum Kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.081.373.250. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Pembinaan Administrasi Kelurahan, dan Dokumen Evaluasi Pembinaan Administrasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- f. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 39.711.600. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Kegiatan



Pelayanan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

- g. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 240.822.750. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Kegiatan meliputi kegiatan BBGRM, GOPTKI, HJKB, Sumpah pemuda, Kepemudaan, WUB, KNPI, Kewirausahaan, Kompepar, Mabiran, Kwaran, Pembinaan Ormas, Posyantek, Wartek, Pokjanal, PMI, PKK dan Posyandu. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan dengan anggaran Rp. 6.661.153.594; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 232 sub kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW. Alokasi anggarannya sebesar Rp 5.499.950.148. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup RW. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 64 sub kegiatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 399.999.954. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup Lingkup PKK. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 64 sub kegiatan.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 361.209.864. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan



Lingkup Karang Taruna. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 68 sub kegiatan.

- d. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 399.993.628. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 36 sub kegiatan.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 1.927.464.284; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Kegiatan pembayaran telepon, internet, listrik, surat kabar dan air. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 12 bulan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/outshoring. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.



- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan Pembelian Alat Tulis Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- f. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan cetakan barang dan penggandaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 1 tahun.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan rapat dan kegiatan. Proporsi capaian



kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.

- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 1 tahun.
- l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator Output Kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran. Indikator Output kegiatannya adalah : jumlah kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan jasa tenaga pengamanan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 695.491.596; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Meningkatnya tingkat kenyamanan masyarakat atas pelayanan public dan meningkatnya efektivitas kinerja lembaga, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan



- realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
- b. Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen pembelian perlengkapan gedung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - c. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Pembelian bbm/oli serta suku cadang kendaraan dinas/operasional. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98%.
 - d. Rehab sedang berat. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen rehab sedang berat gedung kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan di bandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
 - e. Penyediaan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 120.000.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah Meningkatkan disiplin aparatur, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu. Indikator Output kegiatannya adalah : Cakupan penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
- b. Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah pegawai yang



memakai pakaian dinas lapangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	8.973.258.234	8.442.616.491	94,38
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4.634.736.289	4.304.969.336	92,98
	Jumlah	13.607.994.523		93,68

Adapun rincian program, kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran serta output terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

**PROGRAM, KEGIATAN, PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA
OUTPUT KECAMATAN BUAHBATU TAHUN 2018**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.068.249.572	1.904.268.031		92,07
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.003.954	267.919.725	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik terealisasi	73,20
		Kegiatan Penyediaan Jasa	38.713.000	38.689.000	Jumlah unit jasa	99,93



	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			perijinan kendaraan yang dikelola terealisasi	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	186.600.000	157.542.600	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor terealisasi	84,42
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	108.096.400	98.040.700	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja terealisasi	90,69
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	188.345.310	184.165.897	Jumlah paket penyediaan ATK terealisasi	97,78
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.856.500	167.779.450	Jumlah jenis cetakan dan pengadaan terealisasi	98,77
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36.838.508	36.826.388	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan terealisasi	99,96
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.129.700	29.333.155	Jumlah jenis peralatan rumah tangga terealisasi	94,22
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	24.000.000	Jumlah jenis bahan bacaan terealisasi	100
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	237.400.000	226.855.000	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	95,55
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.560.000	100.479.970	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,92
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	367.400.000	367.400.000	Jumlah laporan Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa	109.800.000	104.845.950	Jumlah jasa	95,48



		Pengamanan kantor			bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		712.274.040,00	557.370.890		78,25
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	54.708.840	54.536.490	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor terpelihara	99,68
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	540.488.000	486.596.000	Jumlah unit kendaraan yang dikelola terealisasi	90,02
3	Program peningkatan disiplin aparatur		238.255.000	236.771.500		99,37
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	65.950.000	65.790.000	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya terealisasi	99,98
		Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	24.500.000	24.400.000	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya terealisasi	99,59
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	147.805.000	146.581.500	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu yang terealisasi	99,17
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		5.954.479.622,00	5.744.206.070		96,46
		Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	82.039.930,00,00	80.888.230	Jumlah laporan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat	98,59
		Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	721.697.260,00	669.610.480	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	92,78
		Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.898.209.832,00	1.873.841.200	Jumlah laporan kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup	98,71
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat	890.625.000,00	821.609.460	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas	



		Kecamatan dan Kelurahan			penanganan ketentraman dan ketertiban	92,25
		Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	2.081.373.250,00	2.038.947.500	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemerintahan umum	97,96
		Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	39.711.600,00	36.510.400	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat	91,93
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	240.822.750,00	222.798.800	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	92,51
5	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan		4.634.736.289,00	4.304.969.336,00		92,88
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	3.725.976.739,00	3.462.539.361	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	92,92
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	254.579.750,00	244.556.326	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	96,06
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	354.460.000,00	323.734.349	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	91,33
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	299.719.800,00	274.139.300	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	91,46
		Jumlah Total				93,68

Sumber : Data SIMDA per 31 Desember 2018 setelah rekonsiliasi

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kelima, untuk



Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Buahbatu sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) s/d Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	83,11	85,00	86,71	102,01 %	85,00	85,00	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik terealisasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit jasa perijinan kendaraan yang dikelola terealisasi	76 unit	19 unit	76 unit	53 unit	69,74 %	76 unit	76 unit	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor terealisasi	12 jasa bulanan	10 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja terealisasi	59 unit	21 unit	59 unit	46 unit	77,97 %	59 unit	59 unit	100,00 %
	Kegiatan	Jumlah paket	6 paket	3 paket	6 paket	4 paket	66,67 %	6 paket	6 paket	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyediaan alat tulis kantor	penyediaan ATK terealisasi								
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan pengadaan terealisasi	80 jenis	116 jenis	80 jenis	67 jenis	83,75 %	80 jenis	80 jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan terealisasi	34 jenis	29 jenis	34 jenis	29 jenis	85,29 %	34 jenis	34 jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga terealisasi	94 jenis	73 jenis	94 jenis	75 jenis	79,79 %	94 jenis	94 jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan terealisasi	63 jenis	72 jenis	63 jenis	48 jenis	76,19 %	63 jenis	63 jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	7 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	83,11	85,00	86,71	102,01 %	85,00	85,00	100,00 %
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis penyediaan perlengkapan kantor	0 jenis	*	0 jenis	0 jenis	-	0 jenis	0 jenis	-
	Pemeliharaan	Jumlah jenis	27 jenis	*	27 jenis	26 jenis	97,70 %	27 jenis	27 jenis	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor terpelihara								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola terealisasi	76 unit	76 unit	76 unit	64 unit	84,21 %	76 unit	76 unit	100,00 %
	Program peningkatan disiplin aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	83,11	85,00	86,71	102,01 %	85,00	85,00	100,00 %
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya terealisasi	26 jenis	55 jenis	26 jenis	25 jenis	96,15 %	26 jenis	26 jenis	100,00 %
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu yang terealisasi	5 jenis	13 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00 %	5 jenis	5 jenis	100,00 %
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	83,11	85,00	86,71	102,01 %	85,00	85,00	100,00 %
	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	*	*	*	*	*	*	*	*



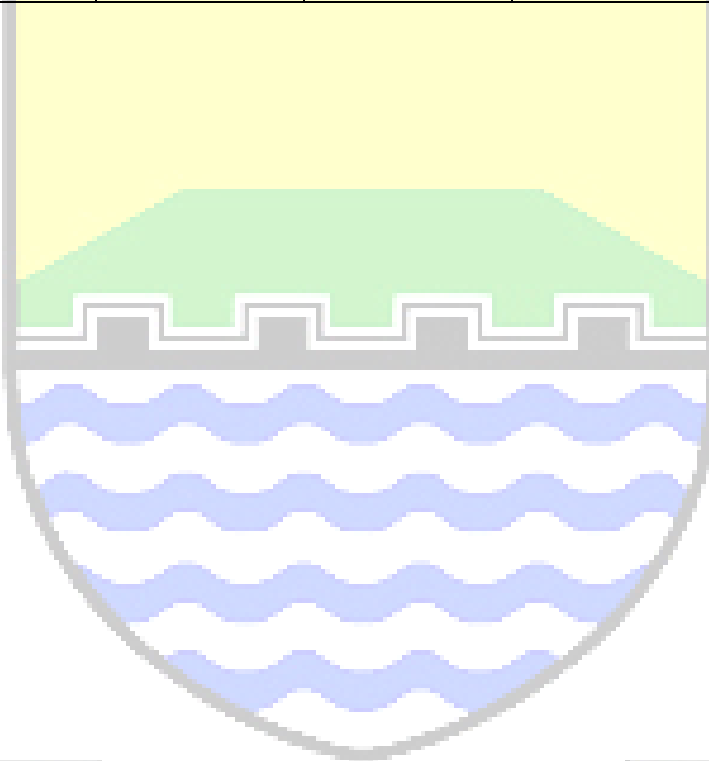
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	83,11	85,00	86,71	102,01 %	85,00	85,00	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi perekonomian masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	*	12 laporan	4 laporan	25,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi kualitas kehidupan kemasyarakatan Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi infrastruktur dan lingkungan hidup Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi ketentraman dan ketertiban Se-Kecamatan	12 laporan	8 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Peningkatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	dan Kelurahan	Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan								
	Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	10 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	umlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	7 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,00 %	79,77 %	80,00 %	88,69 %	110,86 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW	255 sub kegiatan	675 sub kegiatan	255 sub kegiatan	234 sub kegiatan	91,76 %	255 sub kegiatan	255 sub kegiatan	100,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK	24 sub kegiatan	80 sub kegiatan	24 sub kegiatan	21 sub kegiatan	87,50 %	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	100,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna	24 sub kegiatan	72 sub kegiatan	24 sub kegiatan	22 sub kegiatan	91,67 %	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	100,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan LPM	18 sub kegiatan	55 sub kegiatan	18 sub kegiatan	17 sub kegiatan	94,44 %	18 sub kegiatan	18 sub kegiatan	100,00 %



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahbatu ditetapkan melalui Keputusan Camat Buahbatu Nomor : 138/02a-Kec.Bubat Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,00
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75,00

Untuk memantau progress capaian dari indicator kinerja yang telah diperjanjikan menggunakan suatu KPI sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya dapat dijadikan pegangan sebagai berikut :



**Target Kinerja Triwulan
Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018**

Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 1	75	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 2	75	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 3	75	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 4	75	Nilai	
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK	-	-		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK			
				Lingkup RW yang direalisasi	85	sub kegiatan		Lingkup RW yang direalisasi	170	sub kegiatan		Lingkup RW yang direalisasi	255	sub kegiatan	
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK	-	-		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	18	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	36	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	66	sub kegiatan	



Untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penjelasan formulasi/cara pengukuran disesuaikan dengan SK Menpan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dimana terdapat 9 (sembilan) komponen yang menjadi nilai unsur pelayanan sebagai indikator penilaian di masing-masing wilayah.

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 indikator dengan 9 komponen yang menjadi nilai unsur per pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Layanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dimana yang menjadi formulasi/cara pengukurannya berdasarkan persentase rata-rata RW Juara, Siskamling Aktif dan LKK Aktif. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas 3 unsur yang menjadi kriteria penilaian.

Kriteria unsur penilaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

- a) Persentase RW Juara
- b) Siskamling Aktif
- c) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:





LAPORAN CAPAIAN KINERJA UTAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN/DATA KINERJA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	Nilai	84,25	112,33 %	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Rata-rata TW1 sd TW4 = 84,25, merupakan jumlah kumulatif IKM dibagi 5 dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan = 84,00 Kel. Margasari = 83,75 Kel. Cijawura = 82,75 Kel. Sekejati = 85,75 Kel. Jatisari = 85,00
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	%	75	110,86 %	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan = 88,69 % , merupakan jumlah rata2 % RW Juara + LKK Aktif dan Siskamling Aktif dengan rincian sebagai berikut : RW Juara = 84,02 % LKK Aktif = 100,00 % Siskamling Aktif = 82,04 %





1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 adalah sebesar 84,25 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 11,25 point yaitu 112,33 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dimana dapat dilihat dari 9 (sembilan) komponen unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Buahbatu dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Buahbatu.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buahbatu selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur
U1	Persyaratan	3,37
U2	Prosedur	3,39
U3	Waktu Pelayanan	3,33
U4	Biaya/Tarif	3,34
U5	Produk Layanan	3,38
U6	Kompetensi Pelaksana	3,36
U7	Perilaku Pelaksana	3,36
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,33
U9	Sarana dan Prasarana	3,37

Sumber : Kecamatan Buahbatu

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada unsur pelayanan *Waktu Pelayanan* dan *Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan* karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah *Prosedur* harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kategori tertinggi dan terendah hasil IKM tahun 2018 di Kecamatan Buahbatu yaitu :

1. Nilai kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur *Prosedur*.
2. Nilai kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur *Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan*.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi dari unsur *Prosedur* adalah sebagai berikut :

1. Standar *Prosedur Pelayanan (SPP)* sudah diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Buahbatu.
2. Standar *Operasional Prosedur (SOP)* yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, sudah mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Sudah dilakukannya secara maksimal tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan yang diterima dari masyarakat, belum tersedianya petugas layanan khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur *Pengaduan, Saran dan Masukan*.

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan pelayanan public yang prima.
5. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman dimana masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah dari unsur Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah sebagai berikut :

1. Standar Prosedur Pelayanan (SPP) belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Buahbatu.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, belum mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum dilakukannya secara maksimal tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan yang diterima dari masyarakat, belum tersedianya petugas layanan khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan IKM yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan,

- menindaklanjuti rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan ketidakpuasan pelayanan.
2. Kegiatan IKM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.
 3. Memperbaiki sarana dan prasarana di masing-masing wilayah secara maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana anggaran, tepat sasaran dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dari produk layanan yang diberikan oleh Kelurahan maupun Kecamatan.



2. Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Hasil kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018 adalah sebesar 75 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar 8,69 % yaitu 110,86 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Buahbatu dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Buahbatu. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.

Dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Siskamling Aktif karena mempunyai posisi terendah pada survey Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada LKK Aktif yang harus tetap dipertahankan, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018 di Kecamatan Buahbatu yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu LKK Aktif.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada Siskamling Aktif.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Hampir seluruh LKK di Kelurahan telah memenuhi kriteria penilaian LKK Aktif.
2. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan telah mempunyai rencana/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan ruang lingkup Kecamatan/Kelurahan.
3. LKK melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.
4. Minimal 60% Ketua/Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (Siskamling Aktif) sebagai berikut :

1. Masih adanya kriteria Siskamling Aktif yang ditetapkan belum dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan RW.
2. Belum meratanya pelaksanaan kelompok siskamling di lingkungan RW.
3. Belum sepenuhnya pelaksanaan jadwal siskamling atau ronda di lingkungan RW.
4. Masih adanya pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria Siskamling Aktif.

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Tahun 2018 adalah sebesar 88,69 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,92 % atau capaian mengalami peningkatan sebesar 11,18 % terhadap realisasi tahun 2017 sebesar 79,77%.

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling tinggi ada pada kriteria Siskamling Aktif sedangkan pada tahun 2018 menjadi paling rendah, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur dengan kurangnya kegiatan siskamling atau ronda malam di masing-masing lingkungan RW. Hal ini perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur sehingga dapat tercipta kembali suasana ketentraman dan ketertiban di masing-masing wilayah khususnya di kewilayahan Kecamatan Buahbatu dan Kota Bandung pada umumnya.

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling rendah ada pada kriteria RW Juara sedangkan pada tahun 2018 kriteria RW Juara ada peningkatan, yang menjadi faktor pendukung meningkatnya kriteria RW Juara adalah dengan adanya keberhasilan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang menjadi program kerja dan kegiatan di masing-masing kewilayahan, dimana komponen kriteria RW Juara telah dimasukkan kedalam kegiatan yang menjadi sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Pemahaman masyarakat tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sudah dilaksanakan di setiap RW/kampung.
2. Sosialisasi yang intensif dari Kelurahan dan Kecamatan tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terus dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Keberadaan masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan (Individualis).
2. Karakteristik warga masyarakat , jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program yang akan dilaksanakan, melaksanakan rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan dana anggaran untuk menjawab agar tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke depan jauh lebih baik.
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang program yang mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria penilaian kegiatan tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.
3. Kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



Penetapan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018 mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, dan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota baru maka RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BUAHBATU

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Buahbatu dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Buahbatu berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan Kecamatan Buahbatu, yaitu permasalahan tingkat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat implementasi permasalahan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Buahbatu belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Buahbatu sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air.
3. Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
4. Permasalahan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dimana masalah utama yang dihadapi Kota Bandung



adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS).

5. Permasalahan terkait kegiatan koperasi usaha kecil menengah di kewilayahan diantaranya keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk.
6. Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
7. Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat implementasi permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Buahbatu, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Masih belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung ;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan ;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Buahbatu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Buahbatu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung antara lain :



1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu.

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
1	Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Buahbatu belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal	Tingkat pelayanan publik masih menjadi permasalahan utama bagi kewilayahan, hal ini menjadi tugas dan fungsi urusan pelayanan dasar bagi setiap Kecamatan. Meningkatkan pelayanan publik menjadi tugas dan fungsi kewilayahan sesuai dengan misi kota Bandung yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih.	Standar Pelayanan Kewilayahan



2	<p>Permasalahan penanganan banjir/genangan di Kecamatan Buahbatu sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air</p>	<p>Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Buahbatu saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah</p>	<p>Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kenyamanan lingkungan</p>
3	<p>Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan</p>	<p>Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di kewilayahan Kecamatan Buahbatu berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas yang dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Penanganan permasalahan keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak hanya ada dipihak aparat keamanan seperti Kepolisian dan Rayon Militer, akan tetapi peran serta masyarakat dan kelembagaan yang menjadi ujung tombak di masing-masing wilayah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan</p>	<p>Peran serta masyarakat, kelembagaan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>



		kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tingkat permasalahan sosial dan tindak pidana masih ada	
4	Permasalahan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dimana masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)	TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul - Angkut - Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (<i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>). Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan Styrofoam dan anjuran membawa tumbler dan misting ke sekolah. Dan salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah Sektor Informal, seperti pemulung - tukang	Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mewujudkan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kembali



		rongsok – Bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang	
5	Permasalahan terkait kegiatan koperasi usaha kecil menengah di kewilayahan	keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk	Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung program kerja pemerintah kota Bandung
6	Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Kegiatan penguatan kelembagaan masih menjadi permasalahan dengan ditandai kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dan berperan secara aktif pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat baru dimulai sejak tahun anggaran 2017 dan hanya pencapaiannya sebesar 71,76% dari total anggaran yang disediakan sebesar 395 juta.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
7	Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan dapat mengakibatkan tersendat dan terhambatnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Peran pelaksana kegiatan sangat penting untuk ditingkatkan dan optimalisasikan sehingga seluruh aktifitas dan pelaksana kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan sebelumnya.	Peningkatan pembinaan kinerja aparatur



Untuk menentukan prioritas berdasarkan isu strategis tersebut digunakan sejumlah kriteria sebagai bahan scoring (pembobotan) sehingga dapat ditentukan peringkat terhadap prioritas yang ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan menggunakan kriteria tersebut dilakukan pembobotan berdasarkan signifikansi isu terhadap penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pembobotan berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	15 %
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	15 %
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	15 %
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15 %
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola	15 %
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25 %

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu
2. Kebijakan meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan
3. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan pada tahun 2018,



proyeksi tahun 2019 dan 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020, merupakan rencana pada tahun kedua Kepala Daerah periode 2019 – 2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

RKPD Kecamatan Buahbatu tahun 2020, berfokus pada kinerja RPJMD 2018 – 2023 Kota Bandung dan Renstra Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 – 2023 yang belum tercapai serta permasalahan yang akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2020. Berdasarkan asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan diharapkan mampu memberi daya ungkit terhadap pembangunan di kewilayahan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :





Tabel 2.1

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	78 nilai	1.893.866.252	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	86,72 Nilai	1.778.774.600	Program/Kegiatan lanjutan
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 100 %	31.346.252	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- IKM layanan Kependudukan	- 100%	50.517.000	Program/Kegiatan lanjutan
2	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Cakupan RT RW Mendapat Pembinaan	- 100 %	1.862.520.000	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Cakupan RT RW Terbina	- 100 %	1.728.257.600	Janji Politik Wali Kota
II	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Prosentase minimal ruas jalan, kerb, RTH, dan saluran dalam kondisi terpelihara	65 %	2.505.513.655	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Prosentase minimal ruas jalan, RTH, dan saluran dalam kondisi terpelihara	100 %	1.595.209.960	Program/Kegiatan lanjutan
1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Panjang Drainase terpelihara	- 280 m	1.704.748.265	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Panjang ruas jalan yang terpelihara - Panjang Drainase terpelihara	- 1.750 m	1.171.174.100	Program/Kegiatan lanjutan
2	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Kecamatan Buahbatu	- Luas RTH Kecamatan yang terpelihara	- 12 laporan	270.814.430	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Taman terpelihara	- 4 kelurahan	204.022.760	Program/Kegiatan lanjutan





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Kecamatan Buahbatu	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 4620 M	529.950.960	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Kecamatan Buahbatu	- Panjang Kerb Bahu Jalan Terpelihara	- 11.350 m	220.013.100	Program/Kegiatan lanjutan
III	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	65,00 %	1.603.090.355	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 %	1.575.808.800 00	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah koperasi di tempat ibadah	3 usaha /klp/Org	33.657.525	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Koperasi di tempat ibadah - Jumlah Koperasi Juara	- 2 Koperasi - 2 Koperasi	30.000.000	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	55 RW	1.097.002.830	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	- 25 Siskamling RW	978.813.000	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
3	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	96 orang	383.955.000	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah RW Berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	- 4 RW 4 RW	128.070.800	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
4	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah kelompok / kader / lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	4 Kelurahan 4 kelompok	68.475.000	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	Kecamatan & Kelurahan se Kecamatan Buahbatu	- Jumlah RW Siaga - Jumlah Kagana Kelurahan	- 4 kelurahan - 4 Kelompok	413.500.000	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
5	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	200 orang	20.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Buahbatu	- Kegiatan Musrenbang	- 1 Kegiatan	25.425.000	Program Prioritas hasil analisis





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewilayahan		Kecamatan			Kewilayahan					kebutuhan
IV	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	78 %	6.725.000.000	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75 %	8.074.941.445	Janji Politik Wali Kota
1	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	- 128 Sub Kegiatan	5.525.000.000	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase RW Unggul	10 %	6.874.953.245	Janji Politik Wali Kota
2	Pemberdayaan Lingkup PKK	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	- 120 Sub Kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan Lingkup PKK	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase PKK Unggul	10 %	399.999.900	Janji Politik Wali Kota
3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- 91 Sub Kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase Karang Taruna Unggul	10 %	399.992.000	Janji Politik Wali Kota
4	Pemberdayaan Lingkup LPM	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	- 68 Sub Kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan Lingkup LPM	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase LPM Unggul	10 %	399.999.900	Janji Politik Wali Kota
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.366.029.281	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.875.807.665	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	- 12 laporan	218.411.129	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	- 12 laporan	121.636.800	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	Jumlah kegiatan pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 100 %	13.817.650	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	Jumlah kegiatan pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 100 %	-	Rancangan awal RKPD





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 105 Unit	68.346.300	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 105 Unit	29.957.000	Rancangan awal RKPD
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	- 12 jasa bulanan	205.656.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jasa bulanan Kebersihan Kantor	- 12 kegiatan	154.572.000	Rancangan awal RKPD
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki terealisasi	- 4 kegiatan	87.747.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki terealisasi	- 12 kegiatan	55.695.000	Rancangan awal RKPD
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan ATK	- 4 laporan	175.982.602	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan ATK	- 12 kegiatan	150.666.795	Rancangan awal RKPD
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan Penggandaan yang terealisasi	- 12 kegiatan	155.768.273	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah laporan penyediaan Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi	- 12 kegiatan	113.362.200	Rancangan awal RKPD
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang terealisasi	- 4 laporan	43.724.648	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang terealisasi	- 12 kegiatan	18.660.200	Rancangan awal RKPD
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	- 14 unit	265.182.809	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	- 12 kegiatan	103.082.340	Rancangan awal RKPD





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	- 4 kegiatan	66.249.920	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	- 12 kegiatan	64.621.800	Rancangan awal RKPD
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan yang terealisasi	- 4 kegiatan	39.953.289	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan yang terealisasi	- 15 jenis	23.104.000	Rancangan awal RKPD
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terealisasi	- 12 laporan	322.289.660	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terealisasi	- 12 kegiatan	188.212.600	Rancangan awal RKPD
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- 100%	132.000.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- 5 kegiatan	125.000.000	Rancangan awal RKPD
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	- 12 Laporan	570.900.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	- 12 kegiatan	402.193.200	Rancangan awal RKPD
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jasa bulanan kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- 12 kegiatan	120.780.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jasa bulanan kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- 0 jasa bulanan	-	Rancangan awal RKPD
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100 %	673.259.453	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100 %	586.610.050	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan	- Jumlah jenis penyediaan perlengkapan	- 100%	-	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan	- Jumlah jenis penyediaan perlengkapan	- 0 jenis	-	Rancangan awal RKPD



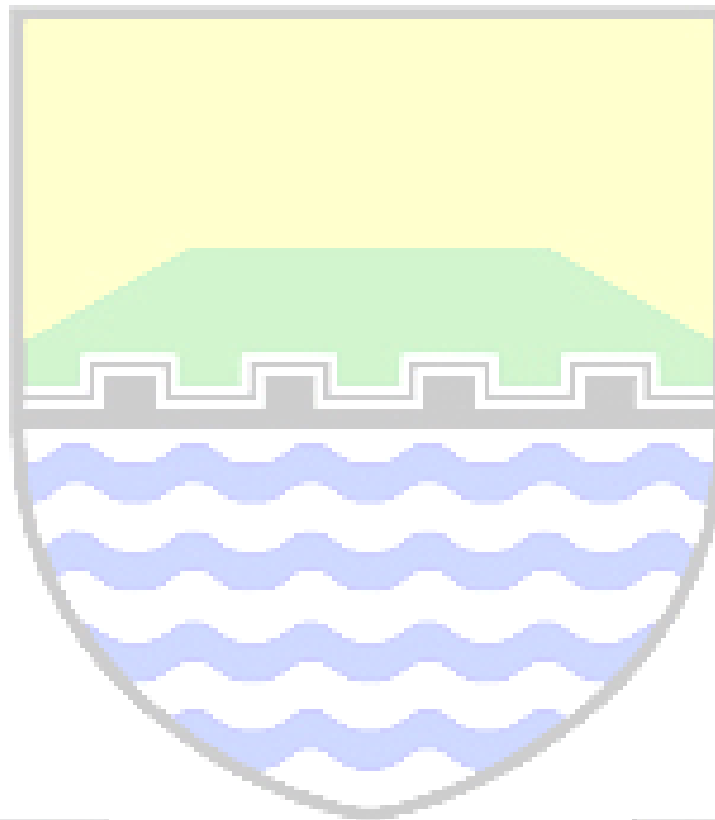


No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor	Buahbatu	gedung kantor			Gedung Kantor	Buahbatu	gedung kantor			
2	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pengadaan mebeulair	- -	-	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pengadaan mebeulair	- 0 jenis	-	Rancangan awal RKPD
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah unit bangunan terpelihara	- 100%	132.715.053	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah unit bangunan terpelihara	- 5 kegiatan	167.710.050	Rancangan awal RKPD
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	- 100%	458.264.400	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	- 5 kegiatan	418.900.000	Rancangan awal RKPD
5	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	- 1 gedung	-	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	- 0 gedung	-	Rancangan awal RKPD
VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	1 paket	28.100.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100 %	35.200.000	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 60 Orang	28.100.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 60 stell	35.200.000	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	- 0 jenis	-	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	- 0 jenis	-	Rancangan awal RKPD
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Buahbatu	- Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 paket	189.750.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Buahbatu	- Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	-	Rancangan awal RKPD





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	- 1 paket	55.500.000	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Buahbatu	- Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	- 1 kegiatan	60.000.000	Rancangan awal RKPD



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui kegiatan *musrenbang* tingkat Kecamatan.
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi tiru dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :



1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
3. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan acuan kinerja yang terdapat dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sector/bidang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

3.1.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi



- a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
 4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
 5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

3.1.2 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.



Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren

- d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Penelaahan Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan

kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Hasil konsultasi publik memuat 14 isu/permasalahan pembangunan di Kota Bandung berdasarkan hasil penapisan, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi;
3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan;
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis;

6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung;
7. Tingginya tingkat kemacetan;
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas;
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung;
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya local;
11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar;
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan;
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

3.1.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 3.5

Isu-isu Strategis

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Buahbatu
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas	1. Pembangunan Modal Sosial 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	1. Standar Pelayanan Kewilayahan 2. Peran Kelembagaan Masyarakat 3. Optimalisasi Pemberdayaan Kewilayahan



<ul style="list-style-type: none">- Hankam- Politik		<ol style="list-style-type: none">9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik		
--	--	---	--	--



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Buahbatu mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat,

adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu

Indikator Sasaran :

- Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu

Sasaran 2 :

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Sasaran :

- Persentase Kelurahan Unggul

Tujuan 2 :

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Sasaran :

- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada period eke IV. Adapun uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2020 khususnya perangkat daerah di wilayah Kecamatan Buahbatu dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2020	Target Akhir Kinerja Sasaran 2023
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	Nilai	75	78	81
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	N/A	50,00	100,00
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	88,69	78,00	80,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2020.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;

- c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2020 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).
 4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020.



Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2020 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang disusun dengan menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Kinerja Capaian Program;
- Besaran Dana yang Dibutuhkan;
- Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Buahbatu pada Tahun 2020 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :





Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.31 Buahbatu

Total Pagu : 16.932.759.895

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	80 Nilai	1.778.774.600	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	81 Nilai	2.083.252.878	
2	06	20	01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	- IKM layanan Kependudukan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 78 nilai	50.517.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	82	34.480.878
2	06	20	02	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW terbina	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 100 %	1.728.257.600	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 100 %	2.048.772.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	- Prosentase minimal ruas jalan, RTH, dan saluran dalam kondisi terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	100 %	1.595.209.960	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	100 %	2.756.065.020
1	03	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang ruas jalan yang terpelihara - Panjang Drainase terpelihara	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 1.750 m - 1.750 m	1.171.174.100	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 1.750 m - 1.750 m	1.875.223.092
1	03	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah taman terpelihara	Kecamatan Buahbatu	4 kelurahan	204.022.760	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	12 laporan	297.895.873
1	03	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	- Panjang Kerb Bahu Jalan Terpelihara	Kecamatan Buahbatu	11.350 m	220.013.100	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 4620 m	582.946.056
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	50,00 %	1.575.808.800	Pendapatan Asli Daerah	Program Prioritas	70 %	1.763.399.391



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 28 01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah koperasi Juara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 2 Koperasi - 2 Koperasi	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 2 Koperasi - 2 Koperasi	37.023.278
2 07 28 02	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 78 Siskamling RW	1.649.944.420	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	1.206.703.113
2 07 28 03	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW Berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 4 RW - 4 rw	128.070.800	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 64,16 %	422.350.500
2 07 28 04	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah RW Siaga - Jumlah Kagana Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	4 Kelurahan 4 Kelompok	413.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 24 RW - 6 Kelompok	75.322.500
2 07 28 05	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	- Kegiatan Musrenbang	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	1 Kegiatan	25.425.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	200 Orang	22.000.000
Program Prioritas									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	07	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	75,00 %	8.074.941.445	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	72,50 %	6.750.000.000	
2	07	26	01	Pemberdayaan Lingkup RW	- Persentase RW Unggul	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 50 % sub kegiatan lingkup RW	6.874.953.245	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 60 % sub kegiatan lingkup RW	5.550.000.000
2	07	26	02	Pemberdayaan Lingkup PKK	- Persentase PKK Unggul	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 80 % sub kegiatan lingkup PKK	399.999.900	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 80 % sub kegiatan lingkup PKK	400.000.000
2	07	26	03	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Persentase Karang Taruna Unggul	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 70 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	399.992.000	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 70 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	400.000.000
2	07	26	04	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Persentase LPM Unggul	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 80 % sub kegiatan lingkup LPM	399.996.300	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 80 % sub kegiatan lingkup LPM	400.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	Urusan Penunjang											
4	05	Fungsi Penunjang Lainnya										
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	100 %	1.875.807.665	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	2.602.632.209	
4	05	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	121.636.800	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	240.252.242
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	121.636.800	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	15.199.415
4	05	01	06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan Yang dibayarkan jasa perijinannya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	105 unit	29.957.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	105 unit	75.180.930
4	05	01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	154.572.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	226.221.600



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 05 01 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	55.695.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	96.521.700
4 05 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan penyediaan ATK	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	150.666.795	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	193.580.863
4 05 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	113.362.200	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	171.345.100
4 05 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	18.660.200	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	48.097.113
4 05 01 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	103.082.340	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	291.701.090



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 05 01 14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	12 kegiatan	64.621.800	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	12 kegiatan	72.874.912
4 05 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 15 jenis	23.104.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 15 jenis	43.948.618
4 05 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 12 laporan	188.212.600	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 laporan	354.518.626
4 05 01 18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Buahbatu	- 5 kegiatan	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 5 kegiatan	145.200.000
4 05 01 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	1 kegiatan	402.193.200	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	1 kegiatan	627.990.000
4 05 01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan	Kecamatan Buahbatu	- 0 jasa bulanan	-	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 jasa bulanan	132.858.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		kantor										
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	100 %	586.610.050	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	740.585.398	
4	05	02	07	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah jenis Pengadaan dekorasi kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 0 jenis	-	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	90.508.000
4	05	02	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis pengadaan mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 0 jenis	-	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 jenis	
4	05	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	5 kegiatan	167.710.050	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	145.986.558
4	05	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	5 kegiatan	418.900.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 105 unit	504.090.840
4	05	02	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung	- Jumlah gedung kantor yang	Kelurahan Se-Kecamatan	- 0 gedung	-	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 gedung	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kantor	direhabilitasi	Buahbatu						
4 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	100 %	35.200.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	28.100.000
4 05 03 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	60 stell	35.200.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	60 stell	28.100.000
4 05 03 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Buahbatu	- 0 jenis	-	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 jenis	
4 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Buahbatu	100 %	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	100 %	208.725.000
4 05 05 04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Kecamatan Buahbatu	- 1 kegiatan	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 1 paket	208.725.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Buahbatu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja ini tidak hanya menjabarkan rencana kegiatan yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan Kegiatan pada tahun 2020 yang tidak dapat diakomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di wilayah Kecamatan Buahbatu.

GEMAH RIPAH WIRAWA MUKTI

Bandung, 31 Juli 2019



Drs. DENNY SANY, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650810 198603 1 024